

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku

- Dr. Baharuddin Thahir, M., Si, Pemerintahan Dan Pemerintahan Indonesia (Dosen Fakultas Politik Pemerintahan: Sulawesi Utara Sito Bondo) 2015 Hal.29
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2004, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat. cetakan kedelapan, (Jakarta: Sinar Grafika) hlm. 24.
- Isra, Saldi. 2010. Pergeseran Fungsi Legislasi Menguatnya Legislasi Parlementer
- Runtuuwu, Y. B. (2023). Penuntutan Dalam Hukum Acara Pidana Oleh Yoan B Runtuuwu. Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia, 36 dalam Sistem Presidensial Indonesia. Jakarta : RajaGrafindo Persada.
- Haris, S. (2014). Partai, pemilu, dan parlemen era reformasi. Yayasan Pustaka Obor Indonesia Anggota IKAPI DKI Jakarta
- MH, R. S. T. S. (2024). Reformasi Hukum Tata Negara: Menuju Keadilan dan Keseimbangan. Ruang Berkarya.
- Shintia Auliya, S.H. Dr. Moh. Taufik, M.H., M.M. dan Dr. Moh. Khamim, S.H., M.H.(2022) pengaturan Hak Angket DPR terdapat KPK dalam Ketatanegaraan di Indonesia,(Yogyakarta: Tanah Air Beta)
- Garret Griffith, Parliamentary Oversight and Accountability: The Role of Parliamentary Oversight Committee, Briefing Paper 12/05, NSW Parliamentary Library Research Service, 2005, hal. 6
- VISUAL, Elemen; CIPTA, Lisensi Hak. Kertas Kebijakan: Mendorong Optimalisasi Pengawasan Parlemen dalam Penanggulangan Terorisme.2019, Hal.10

### 2. Jurnal/Artikel

- Abdul Aziz SR Fungsi Pengawasan Parlemen dalam Perspektif Gender, Journal of Politics and Policy Volume 1, Number 1, Desember 2018 hal.8
- Abdullah Ramdhani, Muhammad Ali Ramdhani, Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik, Jurnal Publik Vol. 11; No.01 (2017) Hal:2
- Andi Heny Mulawati Nurdin, Menuju Pemerintahan Terbuka (Open Government) Melalui Penerapan E Government, Jurnal Mp (Manajemen Pemerintahan) Vol.5, No.1(2018): Hal.3
- Antari, Putu Eva Ditayani. "Implementasi fungsi pengawasan dewan perwakilan rakyat dalam upaya memperkuat sistem presidensial di Indonesia." Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum 4.2 (2020): 217-238 hal.218

- Azmi, Powers and Limitations of Parliamentary Oversight in Indonesia: A Comparative Study". *Journal of Indonesian Governance*,(2020), 8(2), 145-162
- Dr Hj Siti Marwiyah M.Si, *Pola Kebijakan Politik Indonesia Dari Masa Ke Masa*,2022.
- Elynawati, Nurodin Usman, Dan Imam Mawardi, Implementasi Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Untuk Meningkatkan Mutu Pendidikan, *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, Volume 4, Issue. 3, 2023, Hal.680
- Fandi Alfiansyah Siregar, "Transparansi dan Akuntabilitas", *Jurnal publik Undhar Medan* volume II no.2 (2017) hal.2
- Farida Azzahra ,Rekonstruksi Kewenangan Presiden Dalam Pembentukan Undang-Undang Sebagai Upaya Penguatan Sistem Presidensial Indonesia,*Jurnallegislasi Indonesia* Vol 18 No. 2 - Juni 2021: 153-167, Hal.157
- Farida Azzahra, Ekonstruksi Kewenangan Presiden Dalam Pembentukan Undang-Undang Sebagai Upaya Penguatan Sistem Presidensial Indonesia, *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol 18 No. 2 - Juni 2021: 153-167 Hal 157
- Hasan Arifin,Hak Interpelasi DPR RI
- Ina Sophia Kirihio, Peranan Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi (Dprd) Dalam Melaksanakan Fungsi Anggaran Dan Pengawasan Terhadap Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, *Lex Administratum*, Vol. Vii/No. 1,2019, Hal.19
- ISSN 2598-7933 (Online); 2598-7941 (Cetak) Vol. 6 No. 2 (2023): 385-413, DOI: 10.22437/Ujh.6.2.385-413 Hal.402
- Isye Nuriyah Agindawati,"Implementasi Kebijakan Publik dari Perspektif Penyelenggaraan
- Januari Sihotang, Penataan Pengawasan Dpr Terhadap Presiden Dalam Rangka Penguatan Sistem Presidensial Indonesia, *Jurnal Ilmiah Hukum* Volume 13 Nomor 1januari-Juni
- Jhenlee Ervo, Eko Primananda Perbandingan Hukum Tata Negara Mengenai Fungsi Pengawasan Parlemen Antara Indonesia Dan Swedia Volume1Nomor 2 , April-Juni 2024 Hal 734
- Jurusan Ilmu Politik Universitas Bangka Belitung Volume 1 | Nomor 1 | Juli 2019 hal 56
- Kerja Lembaga Tertinggi Negara Dengan/Atau Antar Lembaga-Lembaga Tinggi Negara Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia. (2021). "Laporan Tahunan KPK". Jakarta: KPK.
- Kusuma, S. B., Jayadi, H., Basniwati, A. D., & Fallahiyan, M. A. (2024). Hubungan Fungsional

- antara Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Presiden dalam Bidang Pengawasan di Indonesia menurut UUD 1945. *Jurnal Diskresi*, Hal.21
- M. Syahrudin, "Pengantar Metodologi Penelitian Hukum", Riau: DOTPLUS Publisher, 2022, hlm. 45
- Mirza Satria Buana, Menggagas Pengawasan Badan Perwakilan Dalam Kabinet Presidensial: Perspektif Perbandingan Hukum, *Undang: Jurnal Hukum*
- Ni'matul Huda, Kedudukan Dan Materi Muatan Peraturan Menteri Dalam Perspektif Sistem Presidensial, *Hurnal Hukum Ius Quia Iustum* No. 3 Vol. 28 September 2021: 550 - 571, Hal.559
- Oktaviani Meri Syaputri, Tenyi Nurfiqra, Siti Tiara Maulia, Demokrasi Dan Sistem Pemerintahan Presidensial & Parleментар, *Jurnal Kajian Hukum Dan Pendidikan Kewarganegaraan* Issn : 2961-8754 [Http://Jurnal.Anfa.Co.Id](http://Jurnal.Anfa.Co.Id) *Jurnal.Anfa.Co.Id* Bulan,3 Tahun2023 Vo L3,No1.Hal.2
- Patawari Danisnanto Bidja, Ketentuan Hukum Perbandingan Sistem Pengawasan Terhadap Anggota Lembaga Parlemen Dibeberapa Negara, *Kalabbirang Law Journal* Volume 1, Nomor 2, Agustus (2019) Fakultas Hukum Universitas Indonesia Timur, Email: Patawari.Mh@Gmail.Com 2Fakultas Hukum Universitas Tompotika Luwuk Banggai, Email: Isnantobidja@Yahoo.Co.Id Hal.38
- Pengawasan", *Jurnal Inspirasi BPSDM Provinsi Jawa Barat*, Volume 10, Nomor 1, April (2019) Hal.98
- Putu Eva Ditayani Antari, Mplmentasi Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat dalam upaya Memperkuat Sistem Presidensial Di Indonesia *Urnal ilmu hukum*, Volume 4 Nomor 2, April 2020, Hal.221
- Pratama, Sandy, Arief Hidayat, and Putri Aisyah. "Mendorong Reformasi Parlemen Melalui Kekuatan Civil Society Di Indonesia." *Journal of Political Issues* 1.1 (2019): 50-62.
- Ribkha Annisa Octovina, Sistem Presidensial Di Indonesia, *Cosmogov: Jurnal Ilmu Pemerintahan* Vol.4, No.2, Oktober 2018
- Ridwan Dan Nurmalita Ayuningtyas Harahap, *Hukum Kepegawaian*, UII Press, Yogyakarta, 2018, Hal. 141-142
- Sandy Pratama, Arief Hidayat, Putri Aisyah, Mendorong Reformasi Parlemen Melalui Kekuatan Civil Society Di Indonesia, *Journal of Political Issues*
- Syaiful Anam, Khairil Anwar, Efektivitas Fungsi Pengawasan DPRD Dalam Pelayanan

Publik, (2020), Volume 10 Nomor 1, hlm. 63

Syofyan Hadi, Fungsi Legislasi Dalam Sistem Pemerintahan Presidensial, *Dih. Jurnal Ilmu Hukum*, 2013, Vol. 9, No. 18, Hal. 79

Widayati, Sistem Parlemen Berdasarkan Konstitusi Indonesia, *Mmh*, Jilid 44 No. 4, Oktober 2015

Yati Nurhayati & dkk, "Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum", *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, Vol. 2, No. 1, Februari 2021 (Banjarmasin: 2021), hlm. 10.

Yoshua Alexander, Keberlakuan Undang-Undang Yang Tidak Ditandatangani Oleh Presiden Dalam Sistem Presidensial Indonesia, 2018, Hlm. 9.

### 3. WEBSITE

Wikipedia, diakses pada tanggal 8 juli 2024 : [https://id.wikipedia.org/wiki/Sistem\\_presidensial](https://id.wikipedia.org/wiki/Sistem_presidensial)

<https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20231008-beberapa-kasus-korupsi-di-dpr-dan-dampaknya>

<https://theconversation.com/ramai-ramai-korupsi-persekongkolan-legislatif-dan-eksekutif-138002>

<https://theconversation.com/ramai-ramai-korupsi-persekongkolan-legislatif-dan-eksekutif138002>

Kasus pemilu, diakses 09 juli 2024 : <https://www.antaranews.com/berita/4094013/kejari-jayapura-eksekusi-4-terpidana-kasus-pemilu-2024>

### 4. UNDANG-UNDANG

undang-undang dasarn negara republik Indonesia tahun 1945"

Pembukaan UUD 1945

Undang Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat Dewan Perwa Kilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pasal 2

pasal 7 ayat 2 sampai dengan ayat 4 Ketetapan MPR No. III/MPR/1978 tentang Kedudukan Dan Hubungan Tata Negara